

Dampak Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Pemerintah (BUMN) di Indonesia

Totok Subianto¹, Juwita Purnami Suwondo², Abdul Waris³

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang

³ Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Malang

Email :@yahoo.com

Abstrak :

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi kinerja keuangan Bank BUMN yang menjadi Bank Penyalur KUR dengan menganalisis apakah terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan (CAR, NPL, ROA, BOPO, LDR) sebelum dan sesudah menjadi Bank Penyalur KUR, serta variabel kinerja berdasarkan peringkat untuk melihat peringkat kinerja keseluruhan Bank BUMN. Tekni analisis yang digunakan adalah analisis kecenderungan dan uji beda dua sampel berpasangan (*paired sample t-test*) untuk variabel kinerja dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian yang diperoleh

Kata Kunci :

I. Pendahuluan

Peran strategis perbankan, tidak hanya terbatas pada fungsi intermediasi khususnya proses penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat dan pelaku ekonomi (Renniwaty Siringoringo, 2012). Namun juga berperan penting dalam menggerakkan dan mendorong roda perekonomian dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah (Naasyiatul Lailaa & Elizabeth Penti Kurniawati, 2018). Lebih lanjut dalam tataran makro, bank merupakan instrumen penting dalam menetapkan kebijakan moneter yang dilaksanakan pemerintah (Timothy W. Koch & S. Scott MacDonald, 2000). Dengan memperhatikan berbagai peran strategis yang diemban oleh perbankan, tentunya dibutuhkan pengaturan yang sangat *prudent* agar dapat melaksanakan perannya secara optimal. Namun berkaitan dengan peran peningkatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, seringkali peran ini dilaksanakan oleh Bank BUMN.

Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seringkali juga dikenal Bank Pemerintah, dikarenakan proporsi kepemilikan saham terbesar dalam bank BUMN adalah Pemerintah Republik Indonesia. Dengan kodratnya sebagai bank yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka bank BUMN tidak hanya sekedar berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan. Mendasarkan pada Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk memberikan penugasan khusus kepada Bank BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum (Eko Aristanto, 2005). Namun di satu sisi, bank BUMN didirikan dengan modal dari Kekayaan Negara yang dipisahkan tadi, maka Bank BUMN harus tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan mendasar pada peraturan perundang-undangan

tentang perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan keuangan negara yang berlaku, maka menuntut pengelolaan perbankan *prudent* dan profesional.

Pemerintah memiliki 4 bank BUMN terdiri dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara. Kontribusi keempat bank BUMN tersebut mempunyai kontribusi yang signifikan dalam penyaluran kredit secara nasional, berdasarkan data Bank Indonesia (2018) menunjukkan rata-rata mencapai sebesar 37,7 % dari penyaluran kredit bank umum nasional di Indonesia sepanjang tahun 2014-2017. Peran pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dapat mendorong melakukan intervensi dan menstimulus bank BUMN mengoptimalkan fungsinya sebagai pengumpul dana dan penyalur kredit. Pemerintah dapat mendesain beberapa skema, seperti pola kerjasama, pemberian insentif, atau penugasan kepada bank BUMN agar dapat memberikan kemudahan akses perbankan kepada masyarakat namun tetap mempertahankan tingkat kesehatan bank BUMN tersebut dan tidak melanggar ketentuan bank sentral atau OJK. Konsekuensi terhadap penambahan fungsi tersebut Dari sisi, penyaluran bank BUMN di dorong untuk menyalurkan pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang secara nasional mempunyai potensi 62,9 juta pelaku usaha dengan proporsi 99,9 % dalam struktur ekonomi nasional (Mohamad Nasir, 2015).

Pada tahun 2007, pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam upaya mengatasi permasalahan kesulitan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terhadap akses pembiayaan kredit dari lembaga keuangan. Program Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit program dengan skema penjaminan kredit diperuntukan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang secara ekonomi layak usaha (*feasible*), namun sisi administrasi usaha masih belum memenuhi persyaratan perbankan (tidak *bankable*). Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) menyesuaikan karakteristik usaha mikro dan kecil, jika dilihat dari aspek kemampuan administrasi dan keuangan yang sangat terbatas, tentunya kehadiran Kredit Usaha Rakyat dapat membantu pelaku usaha dalam peningkatan permodalan usaha serta keberlanjutan usaha, walaupun kontribusi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, masih relatif kecil dibanding potensi pelaku usaha mikro dan kecil (Eko Aristanto, 2019). Sebagaimana diketahui bahwa Kredit Usaha Rakyat dapat digunakan untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan (Mandala Harefa, 2015; Syarir Ika, R. Nurhidayat, & Mutaqin, 2016).

Program Kredit Usaha Rakyat menggunakan sumber pendanaan dari perbankan dan menggunakan fasilitas penjamin kredit. Penjaminan kredit menggunakan sistem *automatic conditional cover* dengan cakupan penjaminan sebesar 80% untuk sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan TKI dan 70% untuk sektor lainnya. Agar tidak membebani debitur, premi penjaminan dibayar oleh pemerintah (Mohamad Nasir, 2013). Namun dalam perjalanannya melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 20/PMK.5/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subdisi Bunga Kredit Usaha Rakyat, merupakan koreksi KUR dengan pola penjaminan kredit berubah menjadi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pola subsidi bunga. Dengan perubahan tersebut, intervensi pemerintah tidak lagi dalam bentuk PMN dan OJP (sebagaimana pada KUR pola penjaminan), melainkan dalam bentuk subsidi bunga (belanja pemerintah) yang dialokasikan dalam APBN setiap tahun (Syarir Ika dkk., 2016). Dalam pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pemerintah bekerjasama dengan beberapa bank BUMN yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan.

Pada awal pelaksanaan Program KUR sesuai Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 menjelaskan bank pelaksana KUR adalah Bank

BUMN yakni sebanyak 6 Bank (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri), sedangkan pada tahun 2018 menunjukkan jumlah lembaga penyalur KUR sebanyak 41 lembaga (14 Bank Umum, 20 Bank Pemerintah Daerah, 5 Lembaga Keuangan Non Bank, 2 Koperasi Simpan Pinjam) peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2007. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian tahun 2011 secara Akumulasi penyaluran KUR dari November 2007 sampai dengan 31 Oktober 2011 mencapai Rp 58,8 trilyun dengan jumlah debitur 5,44 juta UMKM. Jumlah debitur KUR sebanyak 5,44 juta UMKM jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada. Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, terdapat 52,18 juta usaha mikro, 546,68 ribu usaha kecil, dan 41,33 ribu usaha menengah pada tahun 2009 (Meby Damayanti & Latief Adam, 2015).

Dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan sumber pendanaan dari bank, tentu bank mengelola dengan prudent dan selalu memegang prinsip 5 C yaitu : *character, capacity, capital, conditions* dan *collateral* (Ahmad Sanusi Nasution, 2011). Pengelolaan yang prudent, tidak terlepas dari proses pengelolaan dana perbankan yang bersumber dari berbagai pihak yang harus memberikan keuntungan dalam operasionalnya. Dengan membantu pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), tentunya membawa dampak bank penyalur KUR diantaranya adalah risiko gagal bayar para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan kinerja keuangan bank, termasuk di dalamnya bank BUMN. Bank BUMN dengan menyalurkan kredit memberikan keuntungan bagi perbankan yaitu melalui selisih bunga yang diberikan kepada orang yang menabung di bank dengan orang yang meminjam di bank, selisih itulah yang nantinya akan menjadi keuntungan oleh bank (Mardi & Liya Faradila, 2016). Begitu juga dengan program Kredit Usaha Rakyat yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2008 ini, program ini akan menambah jumlah kredit yang disalurkan bank penyalur. Namun di satu sisi, Kredit yang diberikan oleh setiap bank kepada nasabahnya secara langsung akan berdampak pada nilai kredit bermasalah itu sendiri. Semakin besar bank menyalurkan kreditnya akan mengakibatkan kredit bermasalah yang ada akan mengikuti perkembangan jumlah kredit itu sendiri maka penghasilan bank akan terpengaruh dengan nilai tersebut (Siswanto Sutojo, 2008). Peningkatan penyaluran kredit akan memberikan keuntungan dan peningkatan pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan Return On Asset (ROA). Semakin besar ROA menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) semakin besar (Bambang Sudyatno & Jati Suroso, 2010). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan kepada UMKM akan menghasilkan pendapatan bunga untuk bank penyalur. Manakalan Bank BUMN menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maka bank tersebut akan memperoleh tambahan pendapatan bunga. Laba yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan merupakan cerminan kinerja sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya (Ahmad Buyung Nusantara, 2009). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan bank akan menghasilkan pendapatan bunga dan tentunya akan meningkatkan laba perusahaan.

Merujuk pada pernyataan di atas, menjelaskan bank BUMN dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah melakukan fungsi perantara keuangan dan *agent of development*. Tentu dalam pengelolaan bank berpegang pada prinsip *prudential banking*, pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan bank (Sholikha Oktavi Khalifaturafi'ah & Zubaidah Nasution, 2016). Pengelolaan bank yang baik akan meningkatkan kinerja keuangan bank secara umum tercermin pada laporan keuangan bank BUMN. Dengan demikian memerlukan kriteria penilaian kinerja keuangan bank yang selama ini menggunakan perhitungan rasio keuangan. Oleh karena itu rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kinerja keuangan bank yang bersangkutan (Etty

M. Nasser, 2003). Tingkat kinerja keuangan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu sumber utama indikatornya adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Laporan keuangan yang dihasilkan bank diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja keuangan dan pertanggungjawaban manajemen bank kepada seluruh *stakeholder* bank (Achmad dan Kusuno, 2003). Kinerja keuangan bank secara ekplisit direpresentasikan oleh rasio-rasio keuangan dapat dinilai dari rasio keuangan bank meskipun tidak menafikan bahwa pada akhirnya bank akan dinilai kesehatannya namun informasi untuk konsumsi public adalah dalam bentuk rasio-rasio keuangan tersebut (taswan,2010), adapun rasio seperti ; *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari aspek permodalan, *Non Performing Loan* (NPL) dan Aktiva Produktif terhadap Total Aktiva Produktif dari aspek aktiva,ROA (Return On Assets), ROE (Return On Equity), (Net Interest Income) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dari aspek Rentabilitas, LDR (Loan to Deposit Ratio) atau rasio Kredit terhadap dana pihak ketiga dari aspek likuiditas serta dari aspek kepatuhan seperti; Pelanggaran dan pelampauan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), rasio GWM (Giro Wajib Minimum) dan PDN (Posisi Devisa Netto).

Dengan latar belakang di atas, penelitian ini menganalisis tentang dampak penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Kinerja Keuangan pada bank BUMN dengan menguji variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank BUMN sebelum dan sesudah menjadi Bank Penyalur KUR. Penelitian ini berguna memberikan informasi tentang dampak penyaluran KUR bagi bank BUMN, yang dapat menjadi dasar pertimbangan keberlanjutan dan partisipasi bank BUMN sebagai bank Penyalur KUR.

II. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan melakukan pengujian komparasi pada berbagai variabel kinerja keuangan Bank BUMN sebelum dan sesudah menjadi Bank Penyalur KUR pada tahun 2005 sampai dengan 2017. Penelitian ini menggunakan data *time series* yang membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan antar periode. Pendekatan pertama adalah pendekatan tren atau perkembangan kinerja dari tahun ke tahun, dengan menggunakan periode observasi 13 tahun, dari periode 2005 s.d. 2017. Analisis tren digunakan untuk mengetahui apakah kinerja bank BUMN mengalami pertumbuhan yang positif atau sebaliknya. Pendekatan kedua adalah pendekatan perbandingan kinerja dari tahun ke tahun, dengan menggunakan periode observasi dari periode 2005 s.d. 2017. Pengujian uji t berpasangan (*paired sample t test*) digunakan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan bank BUMN sebelum dan sesudah menjadi bank penyaluran KUR.

Populasi dan Sampel

Adapun sampel penelitian adalah Bank BUMN yang melakukan penyaluran KUR mulai tahun 2005 sampai dengan 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan jenis data sekunder berupa rasio keuangan yang bersumber dari Laporan Keuangan masing-masing Bank BUMN selama tahun 2005-2017 yang diunduh dari *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masing masing Bank BUMN. Adapun variabel, indikator dan pengukuran variabel kinerja keuangan bank BUMN dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1

Variabel, Indikator dan Pengukuran Kinerja Keuangan

Variabel	Sub. Variabel	Pengukuran	Skala
Kinerja Keuangan	Permodalan	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	Rasio
	Profitabilitas	<i>Return on Asset (ROA)</i>	Rasio
	Efisiensi	Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO)	Rasio
	Risiko Kredit	<i>Non Performing Loan (NPL)</i>	Rasio
	Likuiditas	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	Rasio

Sumber : Data Sekunder, 2019 (diolah)

Teknis Analisis Data

Adapun analisis dan pengujian data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik analisis data yaitu : *pertama* menggunakan analisis kecenderungan (*trend*) dengan metode *ordinary least square* untuk melihat kecenderungan pola data meningkat atau menurun dalam periode waktu pengamatan, dan *kedua* menggunakan uji *independent sample t test* dan *paired sample t test* dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen. Pengujian data dengan *paired sample t test* dilakukan dengan komparasi variabel kinerja keuangan yaitu mulai tahun ke 3 sebelum dan tahun ke 3,5,7 dan 9 sesudah menjadi Bank BUMN penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sampel Bank BUMN yang meliputi Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) dengan periode pengamatan mulai tahun 2005 sampai dengan 2017. Variabel penelitian adalah kinerja keuangan dengan indikator yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Asset (ROA)*, Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), *Non Performing Loan (NPL)* dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Adapun deskripsi data menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan nilai standar deviasi masing-masing variabel kinerja keuangan Bank BUMN. Adapun hasil deskripsi data variabel keuangan dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2

Deskripsi Data Variabel Penelitian

Descriptive Statistic	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CAR	52	13,18	25,30	17,4894	2,93298
ROA	52	0,50	5,15	2,8060	1,23505
BOPO	52	41,60	93,00	72,0115	13,34558
NPL	52	1,55	25,20	4,3250	4,04100
LDR	52	49,20	108,90	80,3327	15,75264

Sumber: Hasil Pengolahan, 2019

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas, variabel CAR, ROA, BOPO dan LDR memiliki nilai *mean* lebih besar dari standart deviasi yang mana berarti datanya memiliki kecenderungan angka yang hampir sama satu sama lainnya. Adapun NPL nilai *mean* lebih kecil dari standart deviasi hal ini berarti pada variabel ini penyebaran datanya terdapat jarak yang besar antara *mean* setiap unit data dengan *mean* hitung, sehingga datanya terdapat kecenderungan yang berbeda satu sama lain.

Tabel 3

Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank BUMN Tahun 2005 - 2017

Bank	Tahun												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mandiri	23,7	25,3	21,1	15,7	15,6	14,7	15,3	15,5	14,9	16,6	18,6	21,3	21,6
BNI	16,0	15,3	15,7	13,5	13,8	18,6	17,6	16,7	15,1	16,2	19,5	19,4	18,5
BRI	15,3	18,8	15,8	13,2	13,2	13,7	14,9	16,8	16,9	18,1	20,5	22,9	22,9
BTN	16,6	18,2	21,9	16,1	21,5	16,7	15,0	17,7	15,6	14,6	17,0	20,3	18,9
Rerata	17,9	19,4	18,6	14,6	16,0	16,0	15,7	16,7	15,7	16,4	18,9	21,0	20,5

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank BUMN (2005-2017), diolah

Tabel 4

Analisis Kecenderungan CAR Bank BUMN Periode 2005 sd. 2017
(Metode *Ordinary Least Square*)

Indikator CAR	Analisis Kecenderungan
Jumlah Data CAR : 52	
CAR Terendah : 13,20	
CAR Tertinggi : 25,30	
Range CAR : 12,12	
Rerata CAR : 17,49	
CAR di Bawah Rerata : 30	
CAR di Atas Rerata : 22	
Standar Deviasi CAR : 2,93	

Sumber : Hasil Pengolahan, 2019

Rasio CAR merupakan perbandingan modal bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), semakin tinggi CAR mengindikasikan bank tersebut semakin sehat permodalannya, sejak tahun 1993 telah ditetapkan kewajiban Penyediaan Modal Minim (KPM) sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tersebut pada dasarnya suatu ukuran modal yang diharapkan dapat menjamin bahwa bank yang beroperasi internasional dan nasional akan beroperasi secara baik atau prudent. (Taswan, 2010)

Berdasarkan tabel 3 dan 4, menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dimiliki oleh bank BUMN dengan nilai terendah sebesar 13,20% pada Bank Rakyat Indonesia periode 2008 dan 2009. Sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dimiliki oleh bank BUMN dengan nilai tertinggi sebesar 25,30% pada Bank Mandiri periode 2006. Adapun rerata *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada keempat bank BUMN selama periode 2005-2017 sebesar 17,49% dengan nilai standar deviasi sebesar 2,93%. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam variabel lebih kecil dari nilai rata-ratanya (*mean*), sehingga simpangan data pada variabel CAR ini dapat dikatakan baik. Dengan nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di bawah rata-rata sebesar 30 (57,69%) dan nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di atas rata-rata sebesar 22 (42,51%). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, selama periode penelitian besarnya CAR bank BUMN di Indonesia sudah memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia, karena seluruh bank BUMN memiliki CAR diatas yaitu minimal 8% dan bank BUMN sudah mematuhi regulasi dari aspek

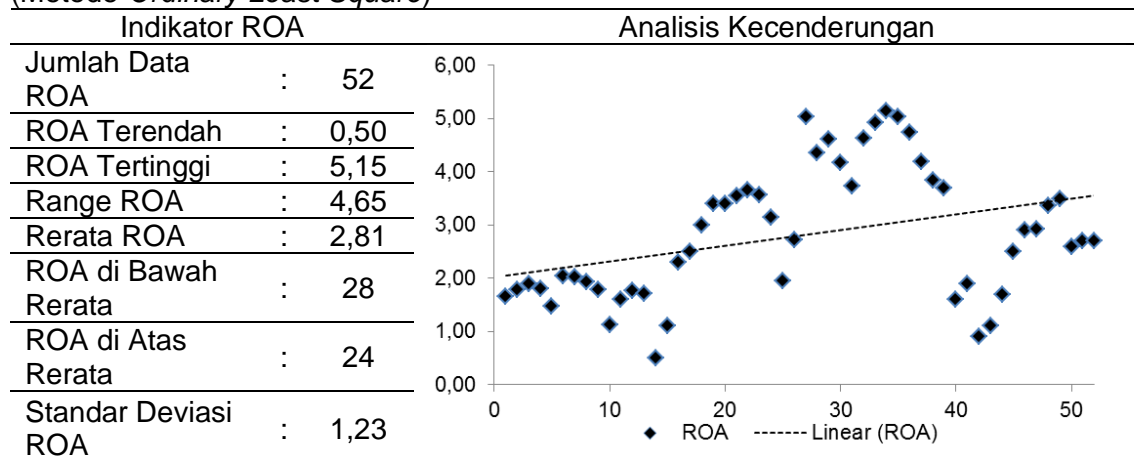
permodalan. Walaupun semua rata-rata CAR yang dimiliki bank BUMN menunjukkan diatas batas minimum ketentuan regulasi namun pola data statistik *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dimiliki oleh bank BUMN selama periode 2005 sampai dengan 2017 menunjukkan kecenderungan menurun dengan slope kemiringan sebesar -0,0023. Khususnya pada periode pengamatan mulai tahun 2013 sampai dengan 2017, hal tersebut mengindikasikan bahwa keikutsertaan bank BUMN dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat walaupun tidak mengganggu kinerja keuangan pada bank BUMN. Namun demikian kecenderungan penurunan CAR itu sudah harus menjadi perhatian pada masa yang akan datang. Karena pada umumnya penurunan rasio kecukupan modal bermakna negatif atau diragukan kemampuan menjamin keberlangsungan bank, sangat rawan dalam mengcover resiko dan dapat mengganggu stabilitas perbankan. (Taswan,2010).Kekawatiran penurunan CAR bank BUMN sebagai penyalur KUR merujuk pada hasil peneltian pada periode pengamatan tahun 2011-2016 menunjukkan bahwa rata-rata CAR bank BUMN lebih kecil sebesar 17,657 % dibandingkan rata-rata CAR Bank Umum Swasta Nasional yaitu sebesar 21,447 %.(Patria Yudha, 2017).

Tabel 5
Perkembangan *Return On Asset* (ROA) Bank BUMN Tahun 2005 - 2017

Bank	Tahun												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mandiri	0,50	11,0	2,30	2,50	3,00	3,40	3,40	3,55	3,66	3,57	3,15	1,95	2,72
BNI	1,60	1,90	0,90	1,10	1,70	2,50	2,90	2,92	3,36	3,49	2,60	2,70	2,70
BRI	5,04	4,36	4,61	4,18	3,73	4,64	4,93	5,15	5,03	4,74	4,19	3,84	3,69
BTN	1,66	1,78	1,89	1,80	1,47	2,05	2,03	1,94	1,79	1,12	1,61	1,76	1,71
Rerata	2,20	2,29	2,43	2,40	2,48	3,15	3,32	3,39	3,46	3,23	2,89	2,56	2,71

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank BUMN (2005-2017) diolah.

Tabel 6
Analisis Kenderungan ROA Bank BUMN Periode 2005 sd. 2017
(Metode *Ordinary Least Square*)



Sumber : Hasil Pengolahan, 2019

Rasio Return On Assets atau ROA mengindikasikan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya, semakin besar rasio menunjukkan bahwa baik kinerja bank dari aspek profitabilitas atau rentabilitas (Taswan,2010)

Berdasarkan tabel 5 dan 6, menunjukkan bahwa *Return On Asset* (ROA) yang dimiliki oleh bank BUMN dengan nilai terendah sebesar 0,50 % pada Bank Mandiri periode 2005. Sedangkan *Return On Asset* (ROA) yang dimiliki oleh bank BUMN dengan nilai tertinggi sebesar 5,15 % pada Bank Rakyat Indonesia periode 2012. Adapun rerata *Return On Asset* (ROA) pada keempat bank BUMN selama periode 2005-2017 sebesar 2,81 % dengan nilai standar deviasi sebesar 1,23 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam variabel lebih kecil dari nilai rata-ratanya (*mean*), sehingga simpangan data pada variabel *Return On Asset* (ROA) ini dapat dikatakan baik. Dengan nilai *Return On Asset* (ROA) di bawah rata-rata sebesar 28 (52,85%) dan nilai *Return On Asset* (ROA) di atas rata-rata sebesar 24 (46.15%). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, selama periode penelitian besarnya *Return On Asset* (ROA) bank BUMN di Indonesia sudah memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu minimal 1,5%. Sedangkan pola data statistik *Return On Asset* (ROA) yang dimiliki oleh bank BUMN selama periode 2005 sampai dengan 2017 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan slope kemiringan sebesar 0,0296. Hal ini memang bisa dipahami bahwa ROA yang dimiliki oleh bank BUMN penyalur KUR pada periode pengamatan tahun 2011-2016 menunjukkan rata-rata lebih besar yaitu sebesar 3,0783 % apabila dibandingkan rata-rata ROA Bank Umum Swasta Nasional yang bukan bank penyalur KUR yaitu sebesar 1,8806 %.(patria Yudha,2017). Sehingga kondisi ini mengindikasikan bahwa keikutsertaan bank BUMN dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat tidak mengganggu kinerja keuangan pada bank BUMN.

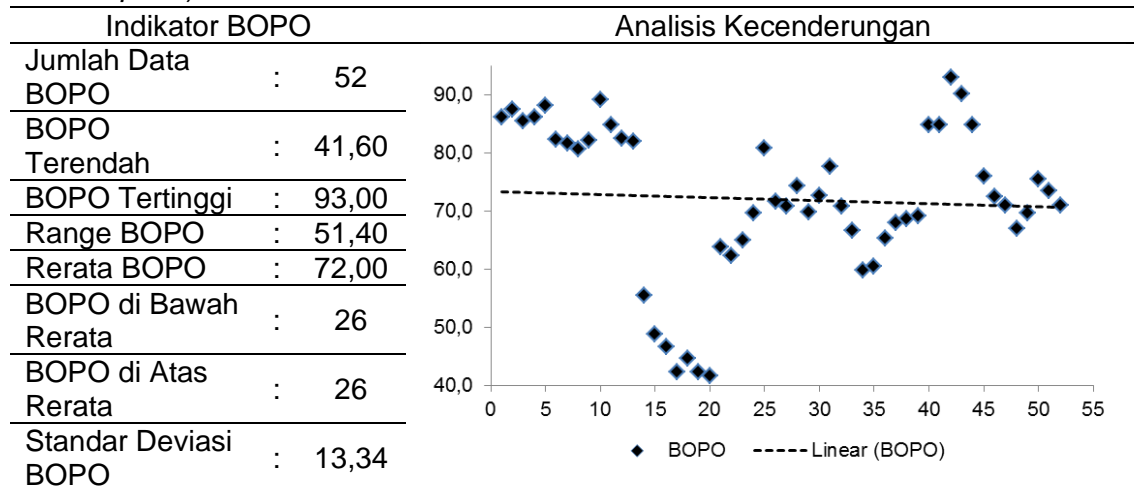
Tabel 7
Perkembangan Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) Bank BUMN
Tahun 2005 - 2017

Bank	Tahun												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mandiri	55,6	48,9	46,7	42,3	44,6	42,4	41,6	63,9	62,4	65,0	69,7	80,9	71,8
BNI	84,9	84,9	93,0	90,2	84,9	76,0	72,6	71,0	67,1	69,8	75,5	73,6	71,0
BRI	70,8	74,4	69,8	72,7	77,7	70,9	66,7	59,9	60,6	65,4	68,0	68,7	69,1
BTN	86,2	87,6	85,6	86,2	88,3	82,4	81,8	80,7	82,2	89,2	84,8	82,5	82,1
Rerata	74,4	73,9	73,8	72,8	73,9	67,9	65,7	68,9	68,1	72,3	74,5	76,4	73,5

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank BUMN (2005-2017) diolah.

Tabel 8

Analisis Kecenderungan BOPO Bank BUMN periode 2005 sd. 2017 (Metode *Ordinary Least Square*)



Sumber : Hasil Pengolahan, 2019

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan tingkat efisiensi operasional bank, semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa semakin tidak efisien biaya operasional bank. (Taswan, 2010)

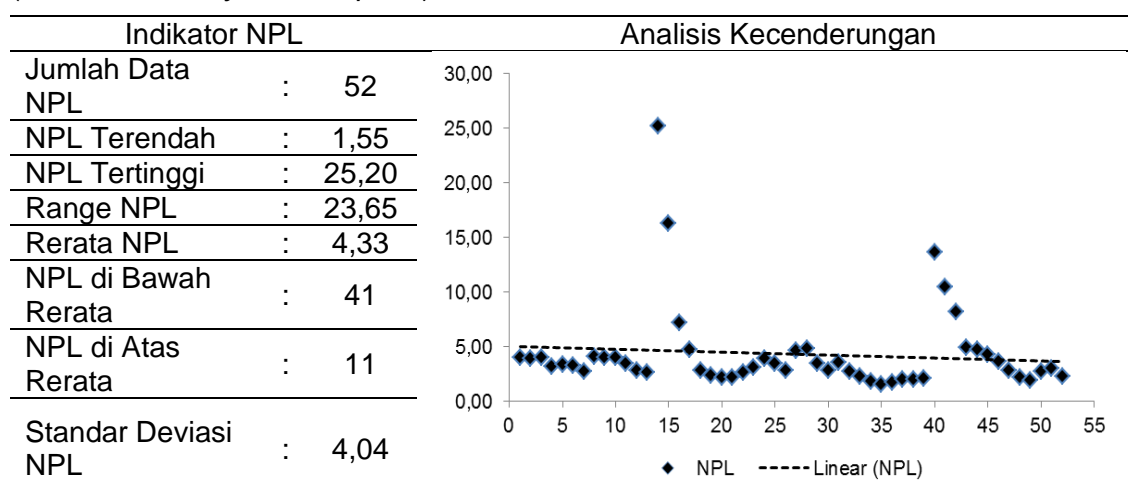
Berdasarkan tabel 7 dan 8, menunjukkan bahwa BOPO yang dimiliki oleh bank BUMN dengan nilai terendah sebesar 41,60% pada Bank Mandiri periode 2011. Sedangkan BOPO yang dimiliki oleh bank BUMN dengan nilai tertinggi sebesar 93,00% pada Bank Negara Indonesia periode 2007. Adapun rerata BOPO pada keempat bank BUMN selama periode 2005-2017 sebesar 72,00 % dengan nilai standar deviasi sebesar 13,34 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam variabel lebih kecil dari nilai rata-ratanya (*mean*), sehingga simpangan data pada variabel BOPO ini dapat dikatakan baik. Dengan nilai BOPO di bawah rata-rata sebesar 26 (50 %) dan nilai BOPO di atas rata-rata sebesar 26 (50 %). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, selama periode penelitian besarnya BOPO bank devisa di Indonesia masih kurang efisien karena berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, besarnya nilai BOPO yang normal berkisar antara 94%-96%. Sedangkan pola data statistik BOPO yang dimiliki oleh bank BUMN selama periode 2005 sampai dengan 2017 menunjukkan kecenderungan menurun dengan slope kemiringan sebesar -0,0593. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keikutsertaan bank BUMN dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat tidak mengganggu kinerja keuangan pada bank BUMN.

Tabel 9
Non Performing Loan (NPL) Bank BUMN Tahun 2005 - 2017

Bank	Tahun												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mandiri	25,2	16,3	7,20	4,70	2,80	2,40	2,20	2,18	2,16	3,10	3,96	3,45	2,79
BNI	13,7	10,5	8,20	4,90	4,70	4,30	3,60	2,84	2,17	1,96	2,70	3,00	2,30
BRI	4,68	4,81	3,44	2,80	3,52	2,78	2,30	1,78	1,55	1,69	2,02	2,03	2,10
BTN	4,04	3,91	4,05	3,20	3,36	3,26	2,75	4,09	4,05	4,01	3,42	2,84	2,66
Rerata	11,9	8,88	5,72	3,90	3,60	3,19	2,71	2,72	2,60	2,69	3,03	2,83	2,46

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank BUMN (2005-2017) diolah.

Tabel 10
Analisis Kecenderungan NPL Bank BUMN periode 2005 sd. 2017
(Metode *Ordinary Least Square*)



Sumber : Hasil Pengolahan, 2019

Rasio Non Performance Loan (NPL) yaitu perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit, rasio ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPL menunjukkan bahwa semakin buruk kualitas kredit yang dimiliki oleh bank tersebut.

(Taswan,2010)

Berdasarkan tabel 9 dan 10, menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) yang dimiliki oleh bank BUMN dengan nilai terendah sebesar 1,55 % pada Bank Rakyat Indonesia periode 2013. Sedangkan *Non Performing Loan* (NPL) yang dimiliki oleh bank BUMN dengan nilai tertinggi sebesar 25,30% pada Bank Mandiri periode 2005. Adapun rerata *Non Performing Loan* (NPL) pada keempat bank BUMN selama periode 2005-2017 sebesar 4,33 % dengan nilai standar deviasi sebesar 4,04 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam variabel lebih kecil dari nilai rataratanya (*mean*), sehingga simpangan data pada variabel *Non Performing Loan* (NPL) ini dapat dikatakan baik. Dengan nilai *Non Performing Loan* (NPL) di bawah rata-rata sebesar 41 (78,85%) dan nilai *Non Performing Loan* (NPL) di atas rata-rata sebesar 11 (21,15%). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, selama periode penelitian besarnya NPL bank devisa di Indonesia sudah melebihi standar yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu di bawah 5%. Sedangkan pola data statistik *Non Performing Loan* (NPL) yang dimiliki oleh bank BUMN selama periode 2005

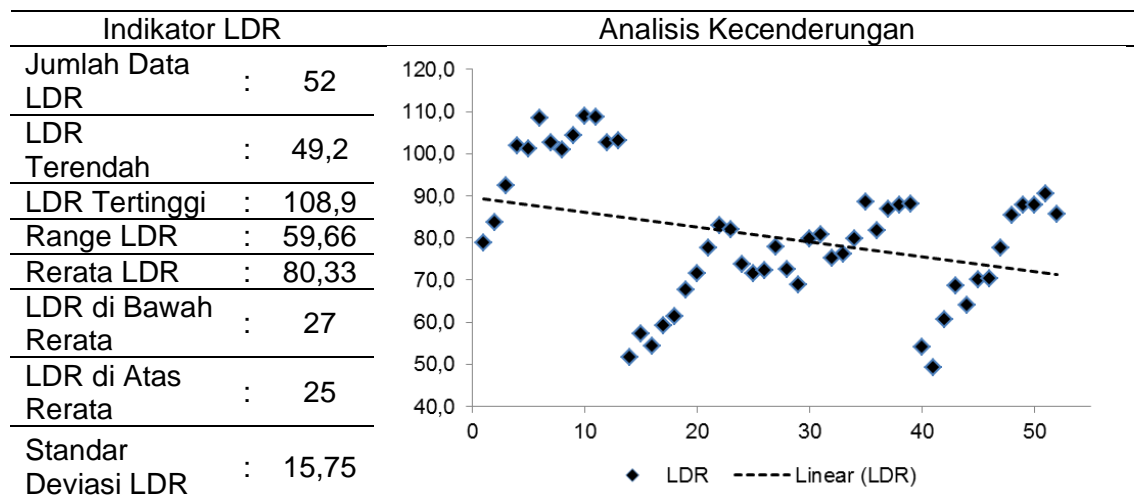
sampai dengan 2017 menunjukkan kecenderungan menurun dengan slope kemiringan sebesar $-0,0275$. Penurunan NPL mengarah perbaikan dalam pengelolaan kualitas kredit yang disalurkan sebagaimana dijelaskan bahwa rata-rata NPL bank BUMN pada periode pengamatan tahun 201-2016 menunjukkan angka lebih kecil apabila dibandingkan dengan rata-rata NPL milik Bank Umum Swasta Nasional yaitu sebesar $1,0367\%$. (Patria Yudha, 2017). Sehingga kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keikutsertaan bank BUMN dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat tidak mengganggu kinerja keuangan pada aspek Aktiva Produktif bank BUMN.

Tabel 11
Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank BUMN Tahun 2005 - 2017

Bank	Tahun												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mandiri	51,7	57,2	54,3	59,2	61,4	67,6	71,7	77,7	82,9	82,0	73,8	71,5	72,4
BNI	54,2	49,2	60,6	68,6	64,1	70,2	70,4	77,5	85,3	87,8	87,8	90,4	85,6
BRI	77,8	72,5	68,8	79,9	80,9	75,2	76,2	79,9	88,5	81,7	86,9	87,8	88,1
BTN	78,9	83,8	92,4	101,8	101,3	108,4	102,6	100,9	104,4	108,9	108,8	102,7	103,1
Rerata	65,7	65,7	69,0	77,4	76,9	80,3	80,2	84,0	90,3	90,1	89,3	88,1	87,3

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank BUMN (2005-2017) diolah.

Tabel 12
Analisis Kecenderungan LDR Bank BUMN Periode 2005 sd. 2017
(Metode *Ordinary Least Square*)



Sumber : Hasil Pengolahan, 2019

Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah perbandingan kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga, semakin besar rasio ini mengindikasikan bahwa bank tersebut agresif likuiditasnya dan sebaliknya semakin kecil rasio ini juga semakin besar dana pihak ketiga yang tidak digunakan untuk penempatan pada kredit. (Taswan, 2010)

Berdasarkan tabel 11 dan 12, menunjukkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang dimiliki oleh bank BUMN dengan nilai terendah sebesar $49,20\%$ pada Bank Negara Indonesia periode 2006. Sedangkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang dimiliki oleh bank BUMN dengan nilai tertinggi sebesar $108,90\%$ pada Bank Tabungan Negara

periode 2014. Adapun rerata *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada keempat bank BUMN selama periode 2005-2017 sebesar 80,33 % dengan nilai standar deviasi sebesar 15,75 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam variabel lebih kecil dari nilai rata-ratanya (*mean*), sehingga simpangan data pada variabel *Loan to Deposit Ratio* (LDR) ini dapat dikatakan baik. Dengan nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) di bawah rata-rata sebesar 27 (51,92%) dan nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) di atas rata-rata sebesar 25 (48,08%). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, selama periode penelitian besarnya *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bank BUMN di Indonesia masih 48,08% yang telah memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu berkisar antara 80%-110%. Sedangkan pola data statistik *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang dimiliki oleh bank BUMN selama periode 2005 sampai dengan 2017 menunjukkan kecenderungan menurun dengan slope kemiringan sebesar -0,3533. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keikutsertaan bank BUMN dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat tidak mengganggu kinerja keuangan pada aspek likuiditas pada bank BUMN.

Pengujian terhadap perbandingan kinerja keuangan Bank BUMN dengan periode tahun ke 3 sebelum dan tahun ke 3,5,7 dan 9 sesudah menjadi Bank BUMN penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka hasil uji *paired sample t test* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 13
Hasil Pengujian *Paired Sampel t Test*

Kriteria	Kinerja Keuangan	Sebelum Menjadi Penyalur KUR			
		3 Tahun Sebelum			
		t	Sig (2-tailed)	Kesimpulan	
Sesudah Menjadi Penyalur KUR	3 Tahun Setelah	CAR	2,020	0,068	Tidak Berbeda
		ROA	-2,101	0,060	Tidak Berbeda
		BOPO	2,469	0,031	Berbeda
		NPL	2,962	0,013	Berbeda
		LDR	-5,895	0,000	Berbeda
	5 Tahun Setelah	CAR	2,605	0,024	Berbeda
		ROA	-1,334	0,209	Tidak Berbeda
		BOPO	1,009	0,335	Tidak Berbeda
		NPL	3,258	0,008	Berbeda
		LDR	-3,734	0,003	Berbeda
	7 Tahun Setelah	CAR	2,064	0,064	Tidak Berbeda
		ROA	-0,232	0,821	Tidak Berbeda
		BOPO	0,458	0,656	Tidak Berbeda
		NPL	3,102	0,010	Berbeda
		LDR	-4,320	0,001	Berbeda
	9 Tahun Setelah	CAR	1,328	0,211	Tidak Berbeda
		ROA	0,353	0,731	Tidak Berbeda
		BOPO	0,055	0,957	Tidak Berbeda
		NPL	3,086	0,010	Berbeda
		LDR	-6,217	0,000	Berbeda

Sumber : Hasil Pengolahan, 2019

Berdasarkan tabel 13, menunjukkan bahwa rasio kinerja keuangan yakni CAR, ROA dan BOPO pada Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Nasional tidak berbeda pada untuk periode pengujian ke 3 sebelum dengan ke 3, 5, 7 dan 9 sesudah menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan hasil pengujian tersebut, bahwa pada aspek permodalan, profitabilitas dan efisiensi yang diukur dengan CAR, ROA dan BOPO menunjukkan tidak terdapat perbedaan pada Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Nasional selama menjadi bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun rasio CAR untuk pengujian ke 3 sebelum dengan ke 3 sesudah menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan hasil pengujian tersebut, bahwa pada aspek permodalan yang diukur dengan CAR menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Nasional selama menjadi bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sedangkan untuk rasio kinerja yakni NPL dan LDR pada Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Nasional menunjukkan berbeda signifikan pada untuk periode pengujian ke 3 sebelum dengan ke 3, 5, 7 dan 9 sesudah menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan hasil pengujian tersebut, bahwa pada aspek risiko kredit dan likuiditas yang diukur dengan NPL dan LDR, menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Nasional selama menjadi bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

IV. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan (a) analisis kecenderungan pada ;(b) analisis kecenderungan pada ;(c) tidak ada perbedaan yang signifikan atas CAR, ROA dan BOPO pada periode sebelum dan sesudah menjadi penyalur KUR sehingga tidak berdampak pada peningkatan kredit bermasalah yang dihadapi oleh pihak BPD; (b) terdapat perbedaan signifikan kinerja risiko kredit dan likuiditas pada periode sebelum dan sesudah menjadi penyalur KUR sehingga peningkatan penyaluran kredit yang dilakukan oleh pihak BUMN tidak diimbangi dengan peningkatan laba.

Berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan yang lebih baik pada variabel profitabilitas di tahun-tahun BUMN menjadi penyalur KUR serta melihat adanya peningkatan kinerja BUMN yang terjadi saat menjadi penyalur KUR dengan tidak adanya perbedaan yang signifikan pada NPL, maka disarankan bagi BUMN mengajukan kembali untuk menjadi penyalur KUR. Saran penelitian yang akan datang adalah untuk melakukan pengujian dengan menggunakan rasio-rasio kinerja perbankan yang lain, antara lain rasio *CAR* dan *BOPO* untuk melihat dampak penyaluran KUR terhadap kinerja perbankan secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

Ahmad Buyung Nusantara. (2009). Analisis Pengaruh NPL, CAR, LDR dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank (Perbandingan Bank Umum Go Publik dan Bank Umum Non Go Publik di Indonesia Periode Tahun 2005-2007) (Tesis, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Diponegoro). Diambil dari http://eprints.undip.ac.id/16298/1/Ahmad_Buyung_Nusantara.pdf

- Ahmad Sanusi Nasution. (2011). Analisis Karakter sebagai Salah Satu Alat Manajemen dalam Pengambilan Keputusan. Diambil dari <https://sanoesi.wordpress.com/2011/09/30/analisa-karakter-sebagai-salah-satu-alat-manajemen-dalam-pengambilan-keputusan-pemberian-kredit/>
- Bambang Sudiyatno, & Jati Suroso. (2010). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR dan LDR terhadap Kinerja Keuangan pada Setor Perbankan Yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia (Periode 2005-2008). *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol 2 No. 2, 125–137.
- Eko Aristanto. (2005). Kajian Mengenai Likuiditas dan Profitabilitas Bank Pemerintah (BUMN) di Indonesia Periode 2003-2004. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, IX No. 3, 837–848.
- Eko Aristanto. (2019). Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. *Journal of Banking and Finance*, 1 No. 1, 10–23.
- Etty M. Nasser. (2003). Perbandingan Kinerja Bank Pemerintah dan Bank Swasta dengan Rasio CAMEL Serta Pengaruhnya Pada Harga Saham. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, 3 No. 3.
- Mandala Harefa. (2015). Masalah dan Tantangan Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. *Kajian*, 20 No. 4, 343–365. <https://doi.org/10.22212/kajian.v20i4.634>
- Mardi, & Liya Faradila. (2016). Pengaruh Non Performing Loan (NPL) dan Bunga Pinjaman terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 12 No. 1, 79–88.
- Meby Damayanti, & Latief Adam. (2015). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia. Diambil dari http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP_27_0611-1.pdf
- Mohamad Nasir. (2013). Analisis Kinerja Program Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Pemangku Kepentingannya. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 17 No. 1, 25–44.
- Mohamad Nasir. (2015). Kelayakan Stimulus Modal Pada Bank Milik Negara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 19 No. 2, 161–179.
- Naasyiatul Lailaa, & Elizabeth Penti Kurniawati. (2018). Penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi Kinerja Bank Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21 No. 1, 24–42.
- Renniwyat Siringoringo. (2012). Karakteristik dan Fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 61–83.
- Sholikha Oktavi Khalifaturafi'ah, & Zubaidah Nasution. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1 No. 2, 42–63.
- Siswanto Sutojo. (2008). *Menangani Kredit Bermasalah*. Jakarta: Mulia Pustaka.
- Syarir Ika, R. Nurhidayat, & Mutaqin. (2016). Kredit Usaha Rakyat (KUR): “Indonesian Way” Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia. Diambil dari www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20160630153115650255356

Timothy W. Koch, & S. Scott MacDonald. (2000). Bank Management (Fourth Edition).
Orlando: The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers.